

TAJUK RENCANA

DIY Terus Panen Prestasi

LUAR biasa! Prestasi gemilang kembali diraih Pemda DIY. Untuk keenam kalinya, DIY berhasil mempertahankan predikat tertinggi dengan nilai AA pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Predikat AA itu diraih sejak tahun 2018 secara berturut-turut hingga sekarang dan DIY masih menjadi satu-satunya yang tertinggi di Indonesia.

Bukan hanya itu saja, dalam penyerahan penghargaan yang dilakukan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Nusa Dua Convention Center Bali, Rabu (6/12), DIY juga meraih predikat A pada penilaian Reformasi Birokrasi serta Zona Integritas atau ZI. Untuk penilaian Zona Integritas, DIY melalui Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapeljamkesos) DIY, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), meningkat dari tahun 2022 yang meraih predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK).

Tentu tidak mudah mempertahankan prestasi tertinggi di Indonesia berturut-turut sampai enam kali ini. Pasti tak lepas dari pola kepemimpinan dan manajemen yang dilakukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X, di samping juga kerja keras dan kerja benar seluruh aparat birokrasi di Pemda DIY. Artinya, apa yang dilakukan Gubernur dan seluruh jajarannya sudah *on the track* atau sudah pada jalan yang benar serta sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan.

Sebagaimana diketahui, SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi kerja pemerintah. Dokumen SAKIP 2023 yang harus disiapkan terdiri Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian

Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL), dan Masing-masing item mempunyai indikator-indikator tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya untuk penilaian kinerja pegawai ada 10, yaitu tanggung jawab peran, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kuantitas hasil, presensi/kehadiran, kerjasama tim, inisiatif, kepemimpinan, perilaku dan karakter. Jadi sangat banyak aspek yang dinilai. iPerolehan SAKIP selama 6 kali berturut-turut ini tidak lepas dari konsistensi menjalankan sistem pemerintahan yang akuntabel, kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, (KR Kamis, 7/12).

Lantas bagaimana ke depannya? Selain berusaha untuk kembali mempertahankan Predikat AA, Sri Sultan juga sudah merancang langkah ke jauh depan. Antara lain akan terus mengeluarkan inovasi yang mendukung kinerja pemerintahan, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Antara lain public policy dan teknologi. Karena mayoritas kabupaten/kota juga sudah memperoleh Predikat A, maka Gubernur mulai bergeser ke kalurahan atau desa. SAKIP Desa merupakan suatu terobosan pembangunan kinerja.

Desa juga perlu akuntabilitas, sehingga kalurahan juga membangun akuntabilitas. Dengan begitu pola pengelolaan keuangan dan pola pelayanan harus berubah. Sebagaimana diungkapkan Sri Sultan, sekarang kalurahan sudah diberi barcode, yang isinya tidak hanya potensi desa, tapi segala informasi layanan dan lainnya bisa didapat.

Kita optimis, dengan kepemimpinan Sri Sultan X dan Sri Paku Alam X, beserta dukungan kerja keras segenap aparaturnya, prestasi bergengsi tersebut akan bisa raih lagi. Bahkan juga berbagai macam prestasi lain yang selama ini terus dipanen. Bravo untuk DIY. (*)- Digital jadi kunci sukses hidup. □d

Keistimewaan, Amanat Konstitusi

FENOMENA kurang menyenangkan kembali menimpa marwah Keistimewaan DIY. Diawali pernyataan politisi yang ditujukan pada sebuah aksi mahasiswa tetapi menyinggung keberadaan politik dinasti di Yogya. Kini, menjadi polemik publik yang berujung pada mengemukanya kembali bahasan tentang Keistimewaan DIY.

Keistimewaan Yogyakarta adalah bukti pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Secara lebih generik, keistimewaan Yogyakarta memiliki dasar hukum kuat di dalam konstitusi. Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Kenapa harus Keistimewaan DIY yang menjadi sasaran arus deras narasi politik yang tak pasti ini? Keistimewaan DIY tak perlu dibawa kemana-mana apalagi dalam pusaran narasi politik *cekek-cekek*. Sejarah DIY sudah sangat berjasa besar bagi lahirnya Republik ini. Konon tanpa DIY tak ada Indonesia. Tak mungkin pula berlanjut kemerdekaan, dan tegaknya pemerintah.

Konsekuensi Konstitusi

Konsekuensi politik dan arah demokrasi DIY adalah konsekuensi konstitusi. Tak ada yang lain. Semua tunduk pada konstitusi yang menegaskan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan NKRI.

Berkaitan dengan dinasti, tak ada satu pun frasa dalam peraturan hukum yang mengatur Keistimewaan DIY tertulis dinasti. Jika merujuk pada Pengaturan Keistimewaan DIY yang ada pada UU Keistimewaan DIY, jelas tujuan utama adanya Keistimewaan ini adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Dan tentunya u kembali pada konstitusi, dimana pada Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 telah mem-

Hendro Muhaimin

buka jalan desentralisasi asimetris. Frasa "dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah" menjadi dasar konstitusional bahwa setiap daerah yang memiliki keunikan dapat diberikan kewenangan secara asimetris dari daerah lainnya. Pertanyaan yang mungkin akan sering muncul adalah "kenapa di daerah ini bisa, tetapi di daerah lain tidak bisa?" Posisi DIY sangat jelas. Status istimewa yang



KR-JOKO SANTOSO

melekat pada DIY merupakan bagian integral sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Keistimewaan DIY berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pen-dayagunaan kearifan lokal. Karena itu penting dan segera untuk kembali memasyarakatkan sejarah Keistimewaan DIY.

Darimana memulainya? *Pertama*, pemerintah daerah harus memainkan peran yang aktif dalam memasyarakatkan kembali sejarah Keistimewaan DIY. Dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan tentang sejarah dan Keistimewaan DIY ke dalam kurikulum

sekolah, serta program-program penguatan SDM Keistimewaan DIY.

Kedua, lembaga pendidikan juga memiliki peran yang penting yakni menyediakan ruang untuk pembelajaran dan apresiasi terhadap warisan budaya lokal, baik melalui mata pelajaran khusus maupun kegiatan ekstrakurikuler. *Ketiga*, masyarakat sipil dan individu secara personal dengan mendukung acara budaya lokal, mempromosikan warisan budaya melalui media sosial, serta dengan aktif terlibat dalam pelestarian dan promosi seni dan budaya tradisional.

Menjadi Jogja

Meskipun sangat umum, setidaknya jalan pewujudan tersebut pernah tersirat pada Sapa Aruh Satu Dasawarsa UUK DIY. Sri Sultan menyampaikan bahwa "kegemilangan predikat istimewa akan semakin bermakna, seiring keragaman yang tercipta dalam kreativitas, adat istiadat, serta *living tradition* masyarakat Yogyakarta, serta sumbangsih seluruh masyarakatnya. Sudah semestinya, keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia".

Posisi masyarakat DIY sampai kapanpun adalah sebagai satu kesatuan. Masyarakat yang memiliki kehendak yang luhur dalam berbangsa dan berne-gara dan keberadaan Kasultanan dan Kadipaten sebagai institusi yang didedikasikan untuk rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa Menjadi Jogja, adalah Menjadi Indonesia. □d

Hendro Muhaimin MA

Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi Pancasila UGM dan Direktur Eksekutif Sinergi Bangsa

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pembinaan Pembuang Sampah Liar

PERILAKU membuang sampah sembarangan ternyata masih dilakukan banyak masyarakat, di tengah problema sampah yang belum usai. Dalih pembuang sampah tentu macam-macam. Dan siapa pelaku tentu juga pelbagai kalangan.

Kasus di Bantul menarik. Karena Satpol PP melakukan patroli dan dapat menangkap pembuang sampah liar. Menarik, karena lelaki yang ditangkap dikenai sanksi pembinaan. Karena pemerintah mengakui masih menghadapi persoalan dalam masalah sampah.

Saya menjadi ingat ungkapan dalam Bahasa Jawa : *iwatuk bisa*

Status Marapi Waspada, Pendaki Terjebak

KAGET dan nyaris tidak percaya ketika mendengar Gunung Marapi di Sumatra Barat erupsi. Lebih kaget lagi ketika mendengar berita ada beberapa pendaki terjebak. Saya sulit membayangkan, mendengar berita itu. Bagaimana nasib para pendaki karena ada lontaran pasir dan

diobati, yen watak, angel. Harapan besar saya dengan melihat kasus Bantul ini ialah sanksi pembinaan ini diberikan karena untuk mengingatkan, di tengah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sampah. Janganlah membuang sampah sembarangan ini menjadi *watak*. Tapi dilakukan karena keterpaksaan karena truk sampah tidak lewat. Karena sejatinya, kalau sampai tertangkap satpol PP gegara membuang sampah liar, tentu sangat malu dan apa yang dilakukan sangat tidak berkelas. *enggak banget* kata anak-anak muda sekarang.

*) **Taufik, Pleret Bantul**

kerikil? Sebagai orang tua saya hanya membayangkan, bagaimana pikiran dan was-was orang tuanya yang memiliki anak-anak sedang di Marapi. Semoga semua dalam lindungannya.

*) **A Ningsih SPd, Jl Wates Kota Magelang**

Hujan, Pemilu dan Bencana Hidrometeorologi

FENOMENA iklim global : Elnino (anomali panas suhu muka laut Samudera Pasifik), memaksa hujan terlambat dua dasarian (sekitar 20 hari) di sebagian besar wilayah DIY. Suhu menyengat khususnya wilayah DIY akhir-akhir ini akibat dari sedikitnya tutupan awan dan posisi semu matahari berada di wilayah Indonesia.

Data prakiraan musim BMKG menunjukkan sebagian besar wilayah DIY mengawali musim hujan antara tanggal 21 hingga 30 November 2023, kecuali area Kota Yogyakarta. Sedang Sleman bagian barat, selatan, timur, Bantul bagian utara, timur laut dan Gunungkidul bagian barat laut; yang mengawali musim hujan antara tanggal 1 hingga 10 Desember 2023 (Dasarian I Desember). Meski demikian musim hujan yang mundur ini tidak mengindikasikan hujan akan cenderung lebih kecil dari tahun tahun sebelumnya.

Hujan akan intensif hingga awal bulan April 2024 dengan intensitas puncak musim hujan pada Februari 2024. Berkaca dari histori bulan Februari ini adalah periode bulan intensnya bencana Hidrometeorologi seperti : terjadi hujan sangat lebat disertai dengan angin kencang yang membuat tanah longsor, pohon tumbang, rumah rusak, dan rusaknya fasilitas umum hingga korban jiwa. (sumber: BPBD DIY).

Panasnya matahari se-panas suhu politik di Indonesia dengan gimik-gimik dan drama penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan ditetapkannya 3 pasangan terbaik bangsa sebagai penanda Pemilu 2024 telah dimulainya kontestasi kepemimpinan Indonesia. Pemilu dimulai dari tahap kampanye pada November 2023 hingga puncaknya saat waktu pencoblosan pada

Heri Ismanto

tanggal 14 Februari 2024. Pesta demokrasi di DIY akan diikuti sekitar 2,870 juta daftar pemilih tetap (DPT), dan dibagi ke 11.392 Tempat pemungutan suara (TPS) (sumber: KPU DIY).

Pesta demokrasi 2024 beriringan dengan musim hujan yang terjadi dengan intensitas yang kuat seperti tahun tahun sebelumnya di DIY. Bulan Februari 2024 diperkirakan sebagai bulan puncak musim hujan, selain hujan dengan intensitas tinggi biasanya diikuti kejadian berbahaya seperti: angin kencang, dan petir. Hal ini harus diwaspadai oleh Tim Penyelenggara Pemilu. Karena selain mengganggu kelancaran pemilu dapat juga berakibat hingga kerusakan infrastruktur, sarana prasarana umum dan korban jiwa.

Distribusi logistik dan perlengkapan pemilu saat pra, hari-H dan pas-pencoblosan dapat saja mengalami gangguan dan kendala akibat musim hujan aktif. Terutama untuk daerah rawan bencana banjir, longsor. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah mengatur ulang lokasi pemungutan suara maupun jalur distribusi jika diindikasikan daerah yang rawan bencana. Antisipasi lain yang perlu dilakukan adalah Tenda/Tempat Pemungutan Suara harus cukup kuat dan kokoh agar tidak terangkat/robok akibat kuatnya kemungkinan angin yang akan terjadi.

Suplemen Kesehatan

Selain itu juga perlu dipertimbangkan penyediaan suplemen ke-

sehatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai antisipasi cuaca saat musim hujan. Bagian penting lainnya adalah perlu dipersiapkan keamanan kotak suara, kertas suara dan kertas kerja rekapitulasi pemungutan suara terhadap gangguan cuaca yang berpotensi mengganggu bahkan menghambat jujur dan adilnya Pemilu 2024.

Pelaksanaan Pemilu 2024 yang bertepatan dengan puncak musim hujan merupakan tantangan tersendiri. Pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) khususnya wilayah DIY dapat mempersiapkan langkah tepat bila kondisi terburuk terjadi. Musim hujan 2024 dapat membawa reze-ki dan keberkahan bagi alam, demikian halnya dengan Pemilu 2024 diharapkan membawa keberkahan bagi masa depan Indonesia. □d

*) **Dr Heri Ismanto Msi, Pemerhati Lingkungan dan Pejabat Fungsional Tingkat Ahli BMKG**

Pojok KR

Ade Armando dilaporkan ke Polda DIY.
-- **Risiko berbicara tidak hati-hati.**

Kasus mingguan Covid-19 RI meningkat.
-- **Harus tetap waspada, jangan lengah!**

Penting, siapkan SDM bertalenta digital.
-- **Digital jadi kunci sukses hidup.**

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Stutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Nour Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d SI, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)